



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 31 MARET 2026



## RINGKASAN BERITA HARI INI



LEBARAN: Bupati Sidoarjo Subandi dalam acara halalbihalal di parkir timur GOR Delta Sidoarjo, Senin (30/3).

### Bupati Dorong OPD Percepat Digitalisasi Layanan

**Kejar Target PAD**  
KOTA-Usai libur Lebaran 2026, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo langsung tanam gas. Bupati Sidoarjo, Subandi, menekankan pentingnya percepatan kinerja birokrasi melalui transformasi digital guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi sekaligus halalbihalal bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Sidoarjo, di parkir timur GOR Delta Sidoarjo, Senin (30/3).  
Subandi menyoroti pentingnya optimalisasi sistem dashboard di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan kinerja secara real-time, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi potensi peningkatan PAD.  
"Kita butuh kontribusi besar, kurang lebih Rp 642 miliar yang harus kita tutupi bersama," tegasnya.  
Ia menambahkan, penguasaan dashboard di masing-masing OPD tidak boleh sekadar formalitas.

Ke Halaman 10



RAJIN: Para siswa SD saat masuk sekolah.

### Batal Daring, Siswa SD-SMP Masuk Sekolah Usai Lebaran

KOTA-Wacana pemberlakuan pembelajaran daring (PJJ) usai libur Lebaran resmi batal. Sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Sidoarjo dipastikan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Senin (30/3) menjadi hari pertama masuk sekolah setelah libur Lebaran 2026. Aktivitas belajar mengajar pun kembali berjalan normal di ruang kelas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Tirta Adi, menegaskan bahwa hingga kini belum ada edaran resmi dari pemerintah pusat terkait penerapan pembelajaran daring.

"Kalau kita ikuti dari media, wacana itu memang sempat muncul. Tapi sepertinya sudah diurungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Senin (30/3).

Ia menegaskan, Dispendikbud Sidoarjo tetap mengacu pada kebijakan resmi yang berlaku. Karena tidak ada instruksi terbaru, seluruh sekolah diminta tetap menjalankan pembelajaran secara langsung.  
"Sampai hari ini belum ada edaran resmi. Sekolah di Sidoarjo tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka," tegasnya.

Ke Halaman 10

### Santan Berlebih saat Lebaran Ketupat

#### Dinkes Ingatkan Risiko Kesehatan

DI balik kelezatan hidangan khas Lebaran Ketupat, tersimpan potensi risiko kesehatan yang kerap luput dari perhatian. Konsumsi santan secara berlebihan yang menjadi bahan utama dalam sajian seperti lontong sayur dan opor dapat memicu berbagai gangguan, mulai dari kolesterol tinggi hingga masalah pencernaan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi makanan bersantan, terutama saat perayaan Lebaran Ketupat.

"Konsumsi santan berlebih dapat meningkatkan kadar kolesterol, menambah asupan kalori, serta memicu gangguan pencernaan seperti mual dan perut kembung," ujarnya, Senin (30/3).

Menurutnya, santan mengandung lemak jenuh tinggi yang jika dikonsumsi secara berlebihan

Ke Hal 10



Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina.

### PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

#### Sampah Menumpuk di Sejumlah Titik, DPRD Sidoarjo Minta Sistem Pengelolaan Dievaluasi Total

SIDOARJO Permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo semakin menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, tumpukan sampah terlihat di sejumlah titik, mulai dari pinggir jalan, kawasan permukiman, hingga pasar tradisional. Kondisi ini memicu keluhan warga karena menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu estetika lingkungan, hingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah yang selama ini berjalan. DPRD menilai, persoalan sampah tidak bisa lagi dibiarkan secara pasif, melainkan harus dilakukan perbaikan dari hulu hingga hilir.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdullah Naah, mengatakan bahwa kondisi penumpukan sampah di sejumlah wilayah menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pengelolaan yang ada saat ini. "Kita tidak bisa dianggap-masih aspele. Kita harus sudah memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan sampah ini. Kami minta dilakukan evaluasi total, mulai dari pengangkutan, pengalihan, hingga manajemen di tingkat bawah," ujarnya, Minggu (28/3).

Menurutnya, permasalahan sampah belakangan ini kian bertambah, tetapi juga menimbulkan pola pengalihan yang

"Kalau hanya mengandalkan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA), itu tidak akan cukup. Harus ada pengurangan dari sumbernya. Evaluasi menyeluruh soal pengelolaan sampah ini sangat penting," tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Aqam. Ia menilai, penanganan sampah harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, meliputi volume sampah di pengangkutan dan pengolahan sampah. Ia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral yang justru menghambat penanganan di lapangan.

### Santan Berlebih..

dapat berdampak serius bagi kesehatan. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi memperburuk penyakit yang sudah diderita.  
"Santan juga dapat memperparah penyakit seperti diabetes, jantung, hingga memicu kembuhan asam urat," jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah kelompok masyarakat perlu lebih waspada dan membatasi konsumsi santan. Di antaranya penderita diabetes, penyakit jantung, kolesterol tinggi, hipertensi, lansia, serta individu dengan obesitas.  
Dinkes Sidoarjo merekomendasikan batas aman konsumsi santan sekitar 1-2 porsi per hari, serta tidak dikonsumsi sekaligus dalam satu waktu.

Kombinasi santan dengan makanan tinggi garam juga dinilai berisiko meningkatkan tekanan darah.  
"Jika dikonsumsi berlebihan, santan dapat meningkatkan risiko hiperkolesterolemia dan berkontribusi terhadap hipertensi, apalagi bila dikombinasikan dengan makanan tinggi garam," tegasnya.  
Sebagai informasi, Lebaran Ketupat

merupakan tradisi yang dirayakan sepekan setelah Hari Raya Idulfitri. Masyarakat biasanya menyajikan ketupat atau lontong berbahan beras yang dibungkus janur atau daun pisang, lengkap dengan lauk bersantan seperti opor dan sayur lodeh. Selain itu, hidangan lepet berbahan ketan dan kacang tanah juga turut meramaikan meja makan.

Meski demikian, dr Lakhsmie menegaskan masyarakat tetap dapat menikmati hidangan khas tersebut tanpa harus mengorbankan kesehatan, selama menjaga pola makan seimbang.  
"Silakan menikmati hidangan Lebaran Ketupat, tetapi tetap perhatikan porsi dan variasi makanan agar kesehatan tetap terjaga," pungkasnya. (dik/vga)

### Bupati Dorong OPD..

Sistem tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memetakan potensi sekaligus mengurai hambatan di tiap sektor. "Caranya dengan menjalankan dashboard di masing-masing

OPD untuk mencari solusi peningkatan PAD," lanjutnya.  
Selain digitalisasi, Subandi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan, ASN tidak hanya dituntut kompeten secara teknis, tetapi juga

harus memiliki empati dalam melayani masyarakat. "Kerja bareng dan empati dalam pelayanan harus dilakukan dengan hati agar aspirasi masyarakat terserap dengan baik," ujarnya.  
Ia juga mengajak seluruh ASN menjaga kedisiplinan serta mematuhi

regulasi yang berlaku demi menciptakan birokrasi yang solid dan responsif. Lebih jauh, Subandi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem atau kecerdasan individu, tetapi juga oleh kekompakan

seluruh elemen birokrasi.  
Dengan semangat baru pasca Lebaran, Pemkab Sidoarjo berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. (dik/vga)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



## PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO

Periode 2024-2029



### Sampah Menumpuk di Sejumlah Titik, DPRD Sidoarjo Minta Sistem Pengelolaan Dievaluasi Total

SIDOARJO-Permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, tumpukan sampah terlihat di sejumlah titik, mulai dari pinggir jalan, kawasan permukiman, hingga pasar tradisional. Kondisi ini memicu keluhan warga karena menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu estetika lingkungan, hingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.



Abdillah Nasih, SM,  
Ketua DPRD Sidoarjo

Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah yang selama ini berjalan. DPRD menilai, persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa kondisi penumpukan sampah di sejumlah wilayah menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengelolaan yang ada saat ini.

"Ini tidak bisa dianggap masalah sepele. Ketika sampah sudah menumpuk di banyak titik, berarti ada yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem. Kami minta dilakukan evaluasi total, mulai dari pengangkutan, pengolahan, hingga manajemen di tingkat bawah," ujarnya, Minggu (29/3).

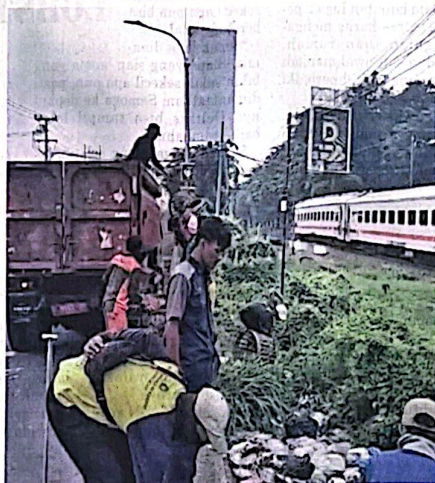
Menurutnya, permasalahan sampah bukan hanya soal keterbatasan armada atau tenaga kebersihan, tetapi juga menyangkut pola pengelolaan yang

belum terintegrasi. Ia menilai, perlu ada langkah konkret untuk memperkuat sistem, termasuk optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan edukasi masyarakat.

"Kalau hanya mengandalkan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA), itu tidak akan cukup. Harus ada penguangan dari sumbernya. Edukasi masyarakat soal pemilahan sampah juga sangat penting," tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Kayan. Ia menilai, penanganan sampah harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, mengingat volume sampah di Sidoarjo terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

"Kami melihat ada beberapa titik yang memang menjadi lang-



ganan penumpukan sampah. Ini harus dipetakan dengan baik. Jangan sampai masalah ini terus berulang tanpa solusi yang jelas," katanya.

M. Kayan juga menyoroti pentingnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama dalam hal pengangkutan dan pengelolaan sampah. Ia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral yang justru menghambat penanganan di lapangan.

"Koordinasi harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena lemahnya komunikasi antarinstansi. Ini menyangkut pelayanan dasar,"

tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD lainnya, Warih Andono, menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan sampah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern, termasuk konsep waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi.

"Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Harus ada inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi agar sampah bisa memiliki nilai tambah. Selain mengurangi volume, juga bisa menjadi sumber energi," ujarnya.



MENGGANGGU: Sampah menumpuk di sejumlah tempat di Sidoarjo butuh penanganan serius.

Warih juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi faktor penting dalam mengatasi persoalan ini.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif. Mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah," jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah warga mengaku resah dengan kondisi penumpukan sampah yang terjadi di lingkungan mereka. Selain menimbulkan bau menyengat, tumpukan sampah juga dikhawatirkan menjadi sarang penyakit, terutama di musim pancaroba.

"Kalau dibiarkan, ini bisa jadi sumber penyakit. Apalagi sekarang cuaca tidak menentu," ujar salah satu warga di kawasan

Sidoarjo kota.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan sampah, mulai dari peningkatan armada pengangkut, pembangunan TPS3R, hingga kampanye pengurangan sampah plastik. Namun, DPRD menilai langkah tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif.

DPRD berharap, evaluasi total yang diminta dapat segera dilakukan, sehingga penanganan sampah di Sidoarjo menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan persoalan penumpukan sampah tidak lagi menjadi keluhan rutin masyarakat.

"Ini harus menjadi momentum untuk berbenah. Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi masalah yang sama tanpa ada perubahan berarti," pungkash Abdillah Nasih. (vga)

radarsidoarjo.id | 031-828 0826 | radarsidoarjo@gmail.com | Facebook: Radar Sidoarjo | Instagram: radarsidoarjo | layout: haki



### PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN MENJADI ENERGI LISTRIK DI PROVINSI JAWA TIMUR

Gedung Negara Graha di, 28 Maret 2023

## PKS PENGELOLAAN SAMPAH SIDOARJO AKAN JADI ENERGI LISTRIK

Sidoarjo, Pojok Kiri,- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejumlah pemerintah daerah lainnya.

Ini sebagai upaya untuk terus memperkuat komitmen dalam menangani sampah berbasis lingkungan. Kerja

sama ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian rapat koordinasi yang sebelumnya telah dilaksanakan guna memetakan konsep dan implementasi pengolahan sampah menjadi energi.

"Upaya ini juga sebagai bukti keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam menghadirkan solusi konkret dan berkelanjutan terhadap permasalahan sampah di daerah," kata Bupati Sidoarjo H.

Subandi, S.H., M.Kn.

Bupati Sidoarjo menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah sekaligus mendukung pengembangan energi baru terbarukan.

"Kami merespon baik inisiatif ini sebagai upaya bersama dalam menghadirkan solusi yang lebih modern dan

berkelanjutan. Tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan sampah menjadi energi listrik," ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, serta tujuh pimpinan lembaga pemerintah di Surabaya Raya dan Malang

Raya yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Melalui PKS ini, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan akhir, melainkan sebagai peluang strategis untuk menghasilkan energi listrik ramah lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup, katanya. (Khol/dy)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



## Santan Berlebih saat Lebaran Ketupat

### ■ Dinkes Ingatkan Risiko Kesehatan

DI balik kelezatan hidangan khas Lebaran Ketupat, tersimpan potensi risiko kesehatan yang kerap luput dari perhatian. Konsumsi santan secara berlebihan yang menjadi bahan utama dalam sajian seperti lontong sayur dan opor dapat memicu berbagai gangguan, mulai dari kolesterol tinggi hingga masalah pencernaan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadin-kes) Kabupaten Sidoarjo, dr Lakshmie Herawati Yuwantina, mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi makanan bersantan, terutama saat perayaan Lebaran Ketupat.

“Konsumsi santan berlebih dapat meningkatkan kadar kolesterol, menambah asupan kalori, serta memicu gangguan pencernaan seperti mual dan perut kembung,” ujarnya, Senin (30/3).

Menurutnya, santan mengandung lemak jenuh tinggi yang jika dikonsumsi secara berlebihan

● Ke  
Hal 10



Kepala Dinas Kesehatan  
Sidoarjo, dr Lakshmie  
Herawati Yuwantina.

#### Santan Berlebih...

dapat berdampak serius bagi kesehatan. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi memperburuk penyakit yang sudah diderita. Penyakit seperti diabetes, jantung, hingga memicu kekambuhan asam urat,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah kelompok masyarakat perlu lebih waspada dan membatasi konsumsi santan. Di antaranya penderita diabetes, penyakit jantung, kolesterol tinggi, hipertensi, lansia, serta individu dengan obesitas. Batas aman konsumsi santan sekitar 1-2 porsi per hari, serta tidak dikonsumsi sekaligus dalam satu waktu.

Kombinasi santan dengan makanan tinggi garam juga dinilai berisiko meningkatkan tekanan darah. “Jika dikonsumsi berlebihan, santan dapat meningkatkan risiko hiperkolesterolemia dan berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit kardiovaskular,” tegasnya. Sebagai informasi, Lebaran Ketupat

merupakan tradisi yang dirayakan sepekan setelah Hari Raya Idulfitri. Masyarakat biasanya menyajikan ketupat atau lontong berbahan beras yang dibungkus janur atau daun pisang, lengkap dengan sayur dan daging. Selain itu, hidangan lepet berbahan ketan dan kacang tanah juga turut meramaikan meja makan.

Meski demikian, dr Lakshmie menegaskan masyarakat tetap dapat menikmati hidangan khas tersebut tanpa harus mengorbankan kesehatan, selama menjaga pola makan seimbang. “Silakan menikmati hidangan Lebaran Ketupat, tetapi tetap perhatikan porsi dan variasi makanan agar kesehatan tetap terjaga,” pungkasnya. (dik/vga)





LEBARAN: Bupati Sidoarjo Subandi dalam acara halalbihalal di parkir timur GOR Delta Sidoarjo, Senin (30/3).

## Bupati Dorong OPD Percepat Digitalisasi Layanan

### Kejar Target PAD

KOTA-Usai libur Lebaran 2026, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo langsung tancap gas. Bupati Sidoarjo, Subandi, menekankan pentingnya percepatan kinerja birokrasi melalui transformasi digital guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi sekaligus halalbihalal bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, di parkir timur GOR Delta Sidoarjo, Senin (30/3).

Dalam arahnya, Subandi menyoroti pentingnya optimalisasi sistem dashboard di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan kinerja secara real-time, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi potensi peningkatan PAD.

"Kita butuh kontribusi besar, kurang lebih Rp 642 miliar yang harus kita tutupi bersama," tegasnya.

Ia menambahkan, penggunaan dashboard di masing-masing OPD tidak boleh sekadar formalitas.

● Ke Halaman 10



#### Bupati Dorong OPD...

Sistem tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memetakan potensi sekaligus mengurai hambatan di tiap sektor. "Caranya dengan menjalankan dashboard di masing-masing

OPD untuk mencari solusi peningkatan PAD," lanjutnya.

Selain digitalisasi, Subandi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan, ASN tidak hanya dituntut kompeten secara teknis, tetapi juga

harus memiliki empati dalam melayani masyarakat. "Kerja bareng dan empati dalam pelayanan harus dilakukan dengan hati agar aspirasi masyarakat terserap dengan baik," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN menjaga kedisiplinan serta mematuhi

regulasi yang berlaku demi menciptakan birokrasi yang solid dan responsif.

Lebih jauh, Subandi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem atau kecerdasan individu, tetapi juga oleh kekompakan

seluruh elemen birokrasi.

Dengan semangat baru pasca Lebaran, Pemkab Sidoarjo berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. (dik/vga)





RAJIN: Para siswa SD saat masuk sekolah.

## Batal Daring, Siswa SD-SMP Masuk Sekolah Usai Lebaran

KOTA-Wacana pemberlakuan pembelajaran daring (PJJ) usai libur Lebaran resmi batal. Sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Sidoarjo dipastikan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Senin (30/3) menjadi hari pertama masuk sekolah setelah libur Lebaran 2026. Aktivitas belajar mengajar pun kembali berjalan normal di ruang kelas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Tirta Adi, menegaskan bahwa hingga kini belum ada edaran resmi dari pemerintah pusat terkait penerapan pembelajaran daring.

"Kalau kita ikuti dari media, wacana itu memang sempat muncul. Tapi sepertinya sudah diurungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Senin (30/3).

Ia menegaskan, Dispendikbud Sidoarjo tetap mengacu pada kebijakan resmi yang berlaku. Karena tidak ada instruksi terbaru, seluruh sekolah diminta tetap menjalankan pembelajaran secara langsung.

"Sampai hari ini belum ada edaran resmi. Sekolah di Sidoarjo tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka," tegasnya. ● Ke Halaman 10







# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



## Diduga Proyek Taman Pondok Mutiara Jelek dan Pemborosan Anggaran

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Proyek Taman di Perumahan Pondok Mutiara diduga sarat pemborosan dan diduga bunga-bunga asal comot. Proyek PL senilai Rp 200 juta yang dikerjakan oleh kontraktor setempat ST dinilai jelek sekali dan sarat pemborosan ucap, H Khol, ketua LSM Setia Bangsa pada wartawan, Senin 30/3/26.

Ia tandaskan gmn dalam satu anggaran thn 2025 proyek Taman Pondok Mutiara dua kali dianggarkan itu kan pemborosan, katanya. Sementara kontraktor pelaksana ST saat dikonfirmasi terkait masalah proyek itu tidak menampilkan dan serta mengakuinya, jawab kontraktor raja PL. (Khol/bersambung)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT

## Bupati Subandi Pimpin Apel Akbar ASN Sidoarjo Kini Butuh Kontribusi Keuangan Hingga Rp642 M



Bupati Subandi memberikan sambutan dalam apel Akbar ASN se Kabupaten Sidoarjo di Parkir Timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Sidoarjo, Bhirawa

Bupati Sidoarjo, Subandi, Senin pagi (30/3) kemarin, di Parkir Timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo, memimpin apel Akbar ASN, sekaligus halalbihalal dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se Kabupaten Sidoarjo.

Subandi berpesan, jika keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kecerdasan SDM saja, tetapi juga pada kekompakan dan rasa empati para ASN Sidoarjo terhadap masyarakat.

"Dengan semangat baru pasca libur Lebaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus meningkatkan performa birokrasi

demi kesejahteraan seluruh warga Sidoarjo," kata Bupati Subandi, ketika memberikan sambutannya.

Subandi juga menyoroti perlunya percepatan dalam segala lini pelayanan, terutama dengan adanya transformasi digitalisasi. Dan memastikan penanganan banjir dan proyek-proyek perbaikan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoar-

jo akan tetap terus berjalan.

Subandi juga menginstruksikan agar pada Bulan April nanti, proses modernisasi dan perbaikan jalan-jalan berlubang sudah mulai terlihat hasilnya.

"Saya minta triwulan kedua ini semua sudah jalan. Terkait jalan berlubang dan pembangunan jembatan serta normalisasi digerakkan dari hulu sampai hilir. Kami pantau terus titik-titiknya. OPD tidak perlu takut selama bekerja di jalur yang benar," tegasnya.

Subandi juga menjelaskan, Kabupaten Sidoarjo saat ini butuh kontribusi keuangan yang besar,

yakni sekitar Rp642 miliar yang harus ditutupi bersama. Caranya, dengan menjalankan dashboard di masing-masing OPD untuk mencari solusi peningkatan PAD.

Subandi memberi contoh di sektor ekonomi dan menekankan pentingnya penguatan UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 250.000 di Sidoarjo. Dana meminta agar proses perizinan dipermudah serta pendampingan terhadap pelaku UMKM terus ditingkatkan, termasuk melalui optimalisasi program subsidi bunga 0,2% Program Kurda. [kus.fen]

HARIAN  
**Bhirawa**  
Wala Saja Bhirawa

✓ Perlukah WFH Bagi ASN?

## Transportasi Umum Bisa Jadi Solusi Hemat Energi

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai mengemuka. Salah satu alasannya untuk efisiensi, termasuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kini pemerintah sedang merancang aturan teknis terkait kebijakan tersebut.

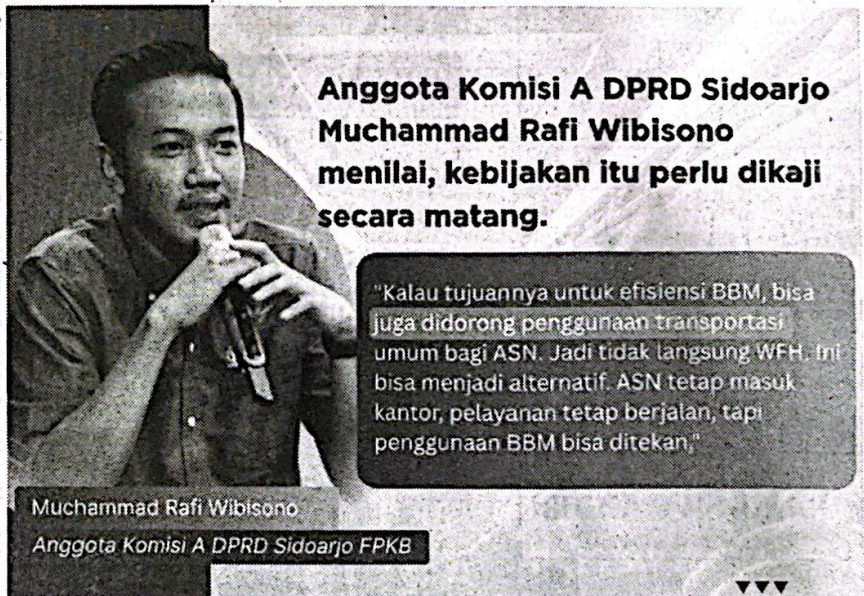
"Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik," jelas Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, M. Misbahul Munir mengatakan kebijakan WFH di Sidoarjo belum jalan. Saat ini masih dalam proses pembahasan. "Masih dalam pembahasan tim," ujarnya.

Menyoroti rencana WFH tersebut, Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Muchammad Rafi Wibisono menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan. Terutama agar tujuan efisiensi tidak berdampak pada pelayanan publik.

Menurutnya, jika orientasinya adalah penghematan energi, masih ada opsi lain yang bisa dipertimbangkan selain WFH.

"Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, sebenarnya bisa juga



**Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Muchammad Rafi Wibisono menilai, kebijakan itu perlu dikaji secara matang.**

"Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH. Ini bisa menjadi alternatif. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan."

Muchammad Rafi Wibisono  
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo FPKB

didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH," ujarnya.

Ia menilai, pengalihan moda transportasi justru bisa menjadi solusi jangka panjang. Selain menekan konsumsi BBM, langkah tersebut juga tetap menjaga aktivitas pelayanan publik berjalan normal.

"Ini bisa menjadi alternatif. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan," jelasnya.

Rafi memahami bahwa WFH memiliki manfaat, terutama dalam kondisi tertentu. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak dijadikan

satu-satunya solusi. Pemkab harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya sebelum kebijakan tersebut diputuskan. "WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh," tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi transportasi umum yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, jika pemerintah serius ingin mendorong efisiensi energi, maka pembenahan sistem transportasi ASN juga harus menjadi perhatian. "Kalau transportasi umum kita sudah nyaman dan terjangkau, ASN pasti lebih mudah beralih. Ini juga bisa jadi momentum pembenahan," katanya. (cat/rus)

# Apel Pagi dan Halalbihalal Awal Cari Solusi Peningkatan PAD

## Bupati Ingatkan Disiplin dan Empati

### Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi memimpin apel pagi sekaligus rangkaian acara halalbihalal yang dihadiri oleh seluruh ASN di lingkup Pemkab Sidoarjo. Acara itu digelar di parkir timur GOR Delta, Senin (30/3).

Dalam kesempatan itu, Subandi menekankan pentingnya transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati juga mengingatkan dan mengajak semua ASN untuk terus meningkatkan kedisiplinan, serta empati dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Subandi menyoroti perlunya percepatan dalam segala lini pelayanan, terutama dengan adanya transformasi digitalisasi. Ia berharap sistem *dashboard* di setiap OPD dapat segera berjalan optimal agar kinerja dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat terpantau secara *realtime*. "Kita butuh kontribusi yang besar, kurang lebih Rp 642 miliar yang harus kita tutupi bersama. Caranya adalah dengan menjalankan *dashboard* di masing-masing OPD untuk mencari solusi peningkatan



Bupati Subandi menyalami jajaran usai pimpin apel pagi sekaligus halalbihalal di parkir timur GOR Delta Sidoarjo.

PAD," ujar Subandi.

Di sektorekonomi, Subandi menekankan pentingnya penguatan sekitar 250 ribu UMKM di Sidoarjo. Ia meminta agar proses perizinan dipermudah serta pendampingan terhadap pelaku UMKM terus ditingkatkan, termasuk melalui optimalisasi program subsidi bunga 0,2 persen Kurda. "Penguatan UMKM harus menjadi perhatian kita

bersama. Permudah perizinan dan pastikan pendampingan berjalan dengan baik, termasuk optimalisasi subsidi bunga Kurda 0,2 persen agar tepat sasaran," tutur Subandi.

Subandi juga memastikan bahwa penanganan banjir dan proyek-proyek perbaikan jalan terus berjalan. Ia menginstruksikan agar pada April mendatang, proses modernisasi dan

perbaikan jalan-jalan berlubang sudah mulai terlihat hasilnya.

"Saya minta triwulan kedua ini semua sudah jalan. Terkait jalan berlubang dan pembangunan jembatan serta normalisasi kita gerakkan dari hulu sampai hilir, kita pantau terus titik-titiknya. OPD tidak perlu takut selama bekerja di jalur yang benar," pungkasnya. (kri/jok/epe)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Panitia Pilkades Rejeni-Balongdowo Buka Pendaftaran Gelombang Ketiga

Gara-gara  
Sepi Peminat

**SIDOARJO** - Pilkades di dua desa, yakni Rejeni (Krembung) dan Balongdowo (Candi) sepi peminat. Panitia terpaksa membuka pendaftaran calon kepala desa (cakades) gelombang ketiga mulai 6 April hingga 16 April.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas PMD Sidoarjo Her-



**SOSIALISASI:** Masa pendaftaran calon kepala desa gelombang ketiga di Desa Balongdowo berlangsung selama 10 hari.

panitia Hadi Lestari mengatakan bahwa masa pendaftaran gelombang ketiga berlangsung

10 hari. Perpanjangan itu menyesuaikan aturan terkait pilkades. Apabila jumlah calon

kurang dari dua orang, maka pendaftaran akan dibuka hingga gelombang ketiga.

Di Desa Rejeni, hingga kini belum ada calon yang ditetapkan. Pada gelombang pertama terdapat satu pendaftar yakni petahana atas nama Afandy Achmad yang akhirnya tidak lolos administrasi. Sementara pada gelombang kedua yang dibuka selama 15 hari belum ada pendaftar masuk.

Sementara itu, di Desa Balong-

dowo sudah ada satu calon atas nama Moch Yatim yang ditetapkan pada gelombang pertama. Pada gelombang kedua, sebenarnya terdapat dua pendaftar. Tapi, keduanya tak lolos verifikasi.

Lantas, bagaimana jika tak ada pendaftar hingga gelombang ketiga? Hermita mengatakan jika hal itu masih menunggu mekanisme dari pemerintah pusat. "Kami masih menunggu aturan pemerintah pusat untuk ke depannya," kata Hermita. **(ful/hen)**

# Jawa Pos

## Sidoarjo

Jawa Pos • METROPOLIS | SELASA 31 MARET TAHUN 2026 | HALAMAN 18



**ANTISIPASI JABATAN KOSONG:** Bupati Subandi (tiga dari kanan) menyalami ASN saat halabihal di parkir timur GOR Delta kemarin (30/3).

## Enam Kepala OPD Pensiun Tahun Ini

Pemkab  
Siapkan Plt dan  
Seleksi Terbuka

**SIDOARJO** - Sebanyak enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Sidoarjo memasuki masa pensiun tahun ini. Mereka berasal dari sejumlah OPD strategis yang selama ini berperan penting dalam pelayanan publik. Kekosongan jabatan pun mulai diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah. Enam pejabat tersebut

yakni Kepala Dispendikbud Tirta Adi, Kepala Dinas Perkim Cipta Karya Moch. Bachruni, Direktur RSUD R.T. Notopuro Atok Irawan, Sekwan DPRD Heri Sucahyono, Kepala Disperindag Widyantoro Basuki dan Kepala BPPD Noer Rochmawati. Masa purna tugas mereka akan berlangsung bertahap. Mulai dari semester awal semester dua hingga menjelang akhir tahun.

Kepala BKD Sidoarjo Misbahul Munir mengatakan, pihaknya telah memetakan jadwal pensiun. Hal tersebut

dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan dalam waktu lama. "Kami sudah menyiapkan skema pengisian jabatan baik melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt) maupun seleksi terbuka," katanya usai acara halabihal kemarin (30/3). Bupati Subandi hadir langsung dalam acara silaturahmi. Subandi menekankan pentingnya transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Kita butuh solusi untuk menambah pendapatan. OPD harus bekerja optimal," katanya. **(ful/hen)**

### DAFTAR PEJABAT YANG PENSIUN TAHUN INI

Kepala Dispendikbud Tirta Adi	Kepala Dinas Perkim Cipta Karya Moch. Bachruni	Direktur RSUD R.T. Notopuro Atok Irawan	Sekwan DPRD Heri Sucahyono	Kepala Disperindag Widyantoro Basuki	Kepala BPPD Noer Rochmawati	Sumber: Pemkab Sidoarjo
----------------------------------	--	--	-------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------

# Jawa Pos

## Terminal Purabaya Layani 1,3 Juta Pemudik Selama Arus Lebaran

SIDOARJO – Arus penumpang di Terminal Purabaya menunjukkan tren penurunan seiring berakhirnya masa arus balik. Sejak 10 Maret hingga kemarin (30/3), terminal telah melayani 1,3 juta pemudik. Saat ini, arus kendaraan dan penumpang mulai normal kembali.

Pelaksana Tugas Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purabaya Verie Sugiharto menyampaikan bahwa jumlah penumpang tertinggi tercatat pada Jumat (27/3) yang mencapai sekitar 55 ribu orang.

"Angka tersebut menjadi puncak arus balik pergerakan penumpang selama periode mudik Lebaran tahun ini,"



MULAI NORMAL: Jumlah penumpang bus di Terminal Purabaya terus berkurang seiring berakhirnya arus balik.

kata Verie. Selanjutnya, jumlah penumpang terus meng-

alami penurunan. Dibandingkan dengan Minggu

(29/3) yang masih berada di kisaran 45 ribu penum-

pang, terjadi penurunan sekitar 20 persen atau menjadi sekitar 36 ribu penumpang kemarin (30/3).

### Jumlah Armada Berkurang

Penurunan juga terlihat dari jumlah armada yang beroperasi. Hingga hari ini, tercatat hanya 1.026 bus yang melayani keberangkatan penumpang dari Terminal Purabaya. Verie memperkirakan kondisi terminal akan segera kembali normal pada hari ini (31/3).

"Kemungkinan besok (hari ini) penurunan ini menandai berakhirnya puncak arus mudik dan aktivitas transportasi mulai kembali seperti hari biasa," katanya. (eza/hen)

# Jawa Pos



DAMKAR BPBD SIDOARJO

**EVAKUASI:** Petugas Damkar Sidoarjo menangkap ular kobra yang masuk ke mesin cuci di Sukodono.

## Dua Kobra Sembunyi di Mesin Cuci

**SIDOARJO** - Warga Dusun Wonokoyo, Desa Klopo Sepuluh, Sukodono, heboh. Dua ular kobra masuk ke mesin cuci milik salah satu warga secara bersamaan. Petugas damkar kesulitan mengevakuasi karena ular bersembunyi.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu menjelaskan, Rescue Damkar Pos Sukodono menerima laporan adanya ular kobra yang bersembunyi di mesin cuci rumah warga Dusun Wonokoyo, Desa Klopo Sepuluh, Minggu (29/3). Petugas lantas turun ke lokasi dengan membawa peralatan lengkap.

Yoli mengatakan dari keterangan pelapor ular diduga masuk ke dalam rumah saat memburu tikus yang kerap muncul di lingkungan permukiman. "Evakuasi sulit karena ular tak mau keluar. Butuh waktu sejam untuk evakuasi dua ular," kata Yoli.

Dia menambahkan, kemunculan ular kobra di kawasan permukiman umumnya dipicu sejumlah faktor. Salah satunya ketersediaan makanan yang menipis. "Kami mengimbau agar menghindari penanganan sendiri karena hewan liar bisa menyerang," katanya. **(eza/hen)**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO





Muscab PKB di Jawa Timur digelar secara bertahap mulai 28 Maret 2026. Untuk Kabupaten Sidoarjo, agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 April 2026.

Terkait penjurangan calon ketua, DPW PKB Jawa Timur telah membentuk tim khusus yang dikenal sebagai "Tim 7" untuk melakukan pemetaan dan seleksi kader. Hasil penjurangan tersebut kemudian diserahkan kepada DPP PKB untuk proses lanjutan sebelum dibawa ke forum Muscab.

Anik Maslachah yang juga tergabung dalam Tim 7 kembali menegaskan bahwa dirinya tidak masuk dalam bursa calon ketua. Ia menilai banyak kader PKB di Sidoarjo yang memiliki kapasitas dan kelayakan untuk memimpin partai.

"Tidak ada jaminan juga jika saya memimpin akan lebih baik. Regenerasi penting, dan PKB memiliki banyak kader potensial," katanya.

Ia berharap proses Muscab dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi PKB Sidoarjo ke depan.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyatakan bahwa proses penentuan calon ketua akan melalui tahapan yang ketat oleh DPP PKB, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Menurutnya, aspek loyalitas, integritas, dan rekam jejak menjadi faktor utama dalam penilaian calon pemimpin partai.

"DPP tentu akan mencermati secara detail setiap kandidat melalui mekanisme yang ada," ujar Abdillah Nasih.(dar/nata/red)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Sidoarjo (republikjatim.com) – Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Sidoarjo yang dijadwalkan digelar 4 April 2026 mendatang, dinamika internal DPC PKB Sidoarjo mulai mengerucut. Meski namanya santer digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk memimpin DPC Kota Delta, Anik Maslachah secara mengejutkan memastikan dirinya tidak akan maju dalam bursa calon Ketua DPC PKB Sidoarjo itu.

Keputusan Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini tentu mengubah peta persaingan. Srikandi PKB asal Kecamatan Sukodono ini menegaskan ingin memberikan kesempatan bagi kader-kader terbaik lainnya untuk menahkodai partai besar ini. Pihaknya, fokus pada regenerasi kader. Anik menilai Sidoarjo memiliki stok kader berkompeten yang melimpah. Ia menampik anggapan hanya dirinya yang bisa menjamin kejayaan PKB di Sidoarjo tetap bertahan.



"Saya tidak nyalon (running). Karena sudah banyak kader yang berkompeten di Sidoarjo. Tidak ada jaminan juga kalau saya yang memegang pasti lebih survive (lebih baik). Harus ada regenerasi dan di internal PKB cukup banyak aset (kader) yang siap memimpin Sidoarjo untuk itu," ujar Anik Maslachah saat menanggapi pencuatnya di permukaan menjelang Muscab DPC PKB Sidoarjo, Senin (30/03/2026).

Dengan absennya Anik Maslachah, perhatian kini tertuju pada sejumlah tokoh senior dan muda yang dinilai memiliki basis massa kuat internal DPC PKB Sidoarjo. Diantaranya H Abdillah Nasih yang menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo saat ini sekaligus Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes yang menjabat Wakil Ketua DPC PKB Sidoarjo sekaligus mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019 - 2024 serta H Rizza Ali Falzin yang saat ini menjabat Kasarkor Banser Jatim.

Sebagai bagian dari Tim 7 yang dibentuk DPW PKB Jatim, Anik menjelaskan proses pemetaan dan penjarangan sudah dilakukan.



Senin, 30 Mar 2026 20:56 WIB

**Perkuat Hubungan Sekaligus Minta Saran, Bupati dan Para Pejabat Sidoarjo Silaturahmi ke Sejumlah Kiai Sepuh**

"Hasil dari tim itu, telah disetor ke tingkat pusat (DPP) PKB untuk dilakukan penggodokan sebelum akhirnya dibawa ke arena Muscab," tegas anggota DPRD Jatim dari Dapil II Sidoarjo ini.

Sementara Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih yang akrab disapa Cak Nasih menyatakan DPP maupun DPW PKB akan sangat selektif dalam memilih pemimpin. Ia menekankan loyalitas dan rekam jejak menjadi variabel utama.

"PKB gudangnya kader loyal. Sesuai mekanisme, DPP PKB akan melakukan tahapan fit and proper test yang ketat. Jadi loyalitas, integritas dan rekam jejak itu yang pasti dicermati DPP PKB," ungkap Cak Nasih.



Senin, 30 Mar 2026 14:08 WIB

**Halal Bihalal Bareng Ribuan ASN, Bupati Sidoarjo Ingatkan Kedisiplinan dan Empati di Setiap Bentuk Pelayanan**

Muscab PKB Sidoarjo ini merupakan bagian dari rangkaian Muscab serentak di wilayah Jawa Timur yang dimulai sejak 28 Maret 2026. Publik kini menanti siapa sosok yang akan dipilih DPP PKB untuk menjaga dominasi DPC PKB di Sidoarjo pada periode mendatang.

"Bismillah, semoga diberikan yang terbaik. Amin," tandasnya. Ary/Waw




# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

08.47

**PJ PROGRESJATIM.COM**  
Jendela Informasi Anda

Beranda Politik & Pemerintahan Hukum &



Progres Jatim.com, Sidoarjo- Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, Kepala BNN Sidoarjo Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo H. Mufi Imron Rosyadi, serta sejumlah kepala OPD Sidoarjo berkunjung ke sejumlah kiai, Senin, (30/3). Ia ajak Kunjungan pertama dilakukan ke Kiai Nur Kholis Misbah pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi Krian. Kedatangan bupati beserta rombongan pagi tadi diterima baik oleh Kyai Nur Kholis Misbah di pendopo pondoknya. Sebelumnya ucapan mohon maaf lahir dan batin disampaikan bupati dan seluruh rombongan. Beberapa nasehat juga disampaikan kyai kepada bupati. Panjatan doa juga dilantunkan Kyai Nur Kholis Misbah untuk bupati Sidoarjo. Usai dari kiai Nur Kholis Misbah, Bupati H. Subandi bersilaturahmi ke Kiai Zaenal Abidin. Sambutan hangat juga diperlihatkan ketua PCNU Sidoarjo itu kepada rombongan bupati. Dirumahnya di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran itu Kiai Zaenal Abidin juga menyampaikan beberapa nasehat dan doanya kepada bupati. Kiai Zaenal Abidin berpesan kepada bupati Sidoarjo agar menjalankan amanah dengan baik dalam memimpin Kabupaten Sidoarjo. Ia yakin jika amanah itu dipegang dengan erat maka kebaikan akan selalu menyertai dalam menjalankan roda pemerintahan.



"Nomer satu amanah yang telah diberikan oleh Allah melalui Pilkada kemarin harus dijalankan dengan baik, inshallah ketika amanah itu dijalankan dengan baik, dengan ikhlas, inshallah semua akan berjalan dengan baik," ucapnya.

Disampaikannya juga bahwa Nahdlatul Ulama (NU) akan ikut berperan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Ia meminta pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Seperti halnya pelayanan bidang kesehatan maupun bidang pendidikan harus tetap menjadi perhatian.

"Nahdlatul Ulama akan terus ikut bersama-sama membantu keberlangsungan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Kiai Zaenal Abidin juga menegaskan bahwa hubungan ulama dengan umara selama ini telah berjalan dengan baik. Bupati selama ini juga kerap kali meminta masukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan kunjungan ke kantor PCNU Sidoarjo juga telah dilakukan Bupati H. Subandi bersama jajarannya untuk mendapatkan pesan dan masukan bagi keberlanjutan pembangunan. Ia juga melihat program pembangunan yang dijalankan bupati dan wakil bupati sudah berjalan baik.

Namun ia meminta kebersamaan dalam membangun daerah lebih ditingkatkan lagi.

"Saya pikir secara umum sudah berjalan dengan baik lah (pembangunan), cuma mungkin perlu dirajut kebersamaan lagi karena bagaimanapun kalau semua bisa bersatu, bisa rukun, bisa guyub seperti sebuah haditsnya kanjeng nabi Kal bunyanil wahid, seperti bangunan satu yang kokoh, kalau itu satu bangunan kokoh maka siapapun yang berteduh disana merasa nyaman," ucapnya.

Bupati H. Subandi sendiri mengatakan keberadaan para ulama memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Masukan dan bimbingan ulama menjadi salah satu modal dalam menjalankan pembangunan dengan baik. Oleh karenanya hubungan umara dengan ulama harus terus diperkuat. Salah satunya dengan bersilaturahmi seperti ini.

"Nasihat para ulama sangat kita butuhkan dalam membangun pemerintah daerah, keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak pernah terlepas dari peran para kyai," ujarnya. (GUS)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Sidoarjo - detikperistiwa.co.id

Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin apel pagi sekaligus rangkaian acara halal bihalal yang dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di parkir timur GOR Delta, Senin (30/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Subandi menekankan pentingnya transformasi digital dan peningkatan kualitasnya pelayanan publik.

Bupati juga mengingatkan dan mengajak semua ASN untuk terus meningkatkan kedisiplinan, serta empati dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Subandi menyoroti perlunya percepatan dalam segala lini pelayanan, terutama dengan adanya transformasi digitalisasi.

Ia berharap sistem dashboard di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera berjalan optimal agar kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terpantau secara real-time.

"Kita butuh kontribusi yang besar, kurang lebih Rp642 miliar yang harus kita tutupi bersama.

Caranya adalah dengan menjalankan dashboard di masing-masing OPD untuk mencari solusi peningkatan PAD," ujar Subandi.



Di sektor ekonomi, Subandi menekankan pentingnya penguatan UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 250.000 di Sidoarjo.

Ia meminta agar proses perizinan dipermudah serta pendampingan terhadap pelaku UMKM terus ditingkatkan, termasuk melalui optimalisasi program subsidi bunga 0,2 persen Kurda.

"Penguatan UMKM harus menjadi perhatian kita bersama.

Permudah perizinan dan pastikan pendampingan berjalan dengan baik, termasuk optimalisasi subsidi bunga Kurda 0,2 persen agar tepat sasaran," tutur Subandi.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kecerdasan, tetapi juga pada kekompakan dan rasa empati para ASN terhadap masyarakat.

ASN diminta mematuhi seluruh regulasi yang ada untuk Kerja Bareng, Empati dengan Pelayanan harus dilakukan dengan hati agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Subandi memastikan bahwa penanganan banjir dan proyek-proyek perbaikan jalan terus berjalan.

Ia menginstruksikan agar pada bulan April ini, proses modernisasi dan perbaikan jalan-jalan berlubang sudah mulai terlihat hasilnya.

"Saya minta triwulan kedua ini semua sudah jalan.

Terkait jalan berlubang dan pembangunan jembatan serta normalisasi kita gerakkan dari hulu sampai hilir, kita pantau terus titik-titiknya.

OPD tidak perlu takut selama bekerja di jalur yang benar," pungkasnya.

Dengan semangat baru pasca libur lebaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus meningkatkan performa birokrasi demi kesejahteraan seluruh warga Sidoarjo. (Luq Wong)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

08.43

idiknasiona.com

BIDIKNASIONAL.com

## Rafi Wibisono Soroti Wacana WFH untuk ASN di Sidoarjo, Perlukah Diterapkan?

bidik · 2 Jam ago · 0 · 53

1 minute read

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Muchammad Rafi Wibisono menilai, kebijakan itu perlu dikaji secara matang.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono. (Foto: ist)

SIDOARJO, [BIDIKNASIONAL.com](https://www.bidiknasiona.com) – Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai mengemuka. Salah satu alasannya untuk efisiensi, termasuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kini pemerintah sedang merancang aturan teknis terkait kebijakan tersebut. "Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik," jelas Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, M. Misbahul Munir mengatakan kebijakan WFH di Sidoarjo belum jalan. Saat ini masih dalam proses pembahasan.

"Masih dalam pembahasan tim," ujarnya.

Menyoroti rencana WFH tersebut, Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Muchammad Rafi Wibisono menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan. Terutama agar tujuan efisiensi tidak berdampak pada pelayanan publik.



Menurutnya, jika orientasinya adalah penghematan energi, masih ada opsi lain yang bisa dipertimbangkan selain WFH.

"Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, sebenarnya bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH," ujarnya.

Ia menilai, pengalihan moda transportasi justru bisa menjadi solusi jangka panjang. Selain menekan konsumsi BBM, langkah tersebut juga tetap menjaga aktivitas pelayanan publik berjalan normal.

"Ini bisa menjadi alternatif. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan," jelasnya.

Rafi memahami bahwa WFH memiliki manfaat, terutama dalam kondisi tertentu. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya solusi. Pemkab harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

"WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh," tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi transportasi umum yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, jika pemerintah serius ingin mendorong efisiensi energi, maka pembenahan sistem transportasi ASN juga harus menjadi perhatian.

"Kalau transportasi umum kita sudah nyaman dan terjangkau, ASN pasti lebih mudah beralih. Ini juga bisa jadi momentum pembenahan," katanya.

Selain itu, Rafi menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik. Ia tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada masyarakat.

"Pelayanan publik tetap harus jadi prioritas. Jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat," ujarnya.

Karena itu, ia menyarankan agar Pemkab Sidoarjo mempertimbangkan berbagai opsi secara komprehensif sebelum memutuskan kebijakan final.

Mulai dari skema transportasi ASN, sistem kerja hybrid, hingga penguatan layanan digital. "Kami berharap ini bisa jadi bahan pertimbangan. Prinsipnya, efisiensi jalan, tapi pelayanan publik tetap maksimal," pungkasnya.